

**ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI
OTONOMI DAERAH DITINJAU ASPEK KEUANGAN
(Studi Empiris pada Wilayah Kabupaten Sukoharjo)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

LISNA KARINA ULFA
B 200 050 334

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2008

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Karena pembangunan di daerah menjadi salah satu indikator atau penunjang demi terwujudnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah pusat membuat suatu kebijakan tentang pemerintah daerah dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah maka otonomi ini dititikberatkan pada daerah kabupaten/kota karena daerah kabupaten/kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Kemampuan Pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Salah satu prinsip pelaksanaan otonomi daerah adalah pelimpahan wewenang kepada daerah otonom untuk melaksanakan seluruh aspek pemerintahan secara utuh dan bulat. Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut, wewenang Pemerintah Pusat akan lebih cenderung pada perumusan kebijakan, perencanaan strategi nasional dan penyusunan standar, norma, dan prosedur. Sedangkan pengelolaan sistem pemerintahan daerah dan perencanaan operasional akan menjadi titik berat kewenangan daerah sebagai pemerintah otonomi.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah.

Analisis keuangan adalah suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan terjadi. Analisis rasio keuangan APBD diharapkan dapat menjadi suatu alat ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam menghargai penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditentukan oleh adanya 5 (lima) kondisi strategis yaitu: (i) *Self Regular power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di

daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi daerah, termasuk terobosan inovatif kearah kemajuan dalam menyikapi potensi daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi kuat dari masyarakatnya baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) *Managing Financial Resource*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola optimal sumber penghasilan dan keuangan guna pembiayaan aktivitas pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat; serta (v) *Developing Brain Power*, dalam arti pembangunan SDM yang handal dan selalu bertumpu kapabilitas penyelesaian masalah.

Konsekuensi dari otonomi ini, daerah tidak semata-mata merupakan pelimpahan kekuasaan saja. Hal tersebut sesuai dengan UU No 32 tentang pemerintah daerah, sebagai revisi UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No 32 tahun 2004 bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekosentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Selain itu juga dikeluarkan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagai revisi dari UU No 25 tahun 1999. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ini diharapkan lebih mendukung pemberdayaan pemerintah daerah dalam

rangka pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan kedua misi undang-undang tersebut diperlukan perubahan sistem pemerintahan dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola keuangan daerah yang transparan, ekonomis, efisien, efektif.

Salah satu elemen yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut adalah desentralisasi fiskal (*fiscal decentralisation*) yang merupakan komponen utama dari desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan memiliki kemandirian/kemampuan yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis mengambil judul: “ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM MEGHADAPI OTONOMI DAERAH DITINJAU ASPEK KEUANGAN (Studi Empiris pada Wilayah Kabupaten Sukoharjo).”

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan otonomi daerah, dilihat dari derajat desentralisasi fiskal,

kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal, upaya fiskal dengan tingkat pendapatan asli daerah standar pada Realisasi tahun 2003-2006?

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan jelas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah lebih terfokus pada perkembangan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo Realisasi tahun 2003-2006.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo Realisasi tahun 2003-2006.
2. Menganalisis derajat otonomi fiskal Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo yang ditekankan pada derajat desentralisasi fiskal, kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal.
3. Menganalisis dan mengetahui kinerja keuangan daerah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dijadikan alternatif masukan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah daerah

melaui akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo
Realisasi tahun 2003-2006.

2. Bagi Penulis untuk mengembangkan wawasan, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan sesuai dengan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah.
3. Dapat dijadikan landasan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

F. Sistematika Pembahasan

Pada skripsi ini akan disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, secara garis besar masing-masing bab akan diuraikan dan dijelaskan secara rinci.

BAB I. PENDAHULUAN. Dalam Bab I ini berisi tentang pendahuluan dimana akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA. Bab II menjelaskan tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, yaitu Pengertian Akuntansi Sektor Publik, Tujuan Akuntansi Sektor Publik, Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik, Pengertian Kinerja, Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan Otonomi Daerah, Derajat Otonomi Fiskal, Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Keuangan Daerah.

BAB III. METODE PENELITIAN. Bab III membahas metode penelitian yang menguraikan jenis penelitian, obyek penelitian, sumber data, dan teknik analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab IV menjelaskan tentang analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini akan diuraikan secara jelas oleh peneliti mengenai gambaran umum Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan membahas analisis data yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V. PENUTUP. Bab V merupakan penutup, yang menguraikan kesimpulan dari analisis data dan saran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan keterbatasan penelitian.